



REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

Pemerataan Pembangunan
untuk Pertumbuhan Berkualitas



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
TAHUN 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-II.2-

pengembangan pelabuhan perikanan telah dilakukan pada 22 unit pelabuhan, dan konservasi kawasan laut seluas 19,14 juta hektar.

PN Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) masih perlu ditingkatkan dalam hal pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan yang mencapai 4,29 persen. Adapun pembangunan KEK di Luar Jawa telah mencapai sembilan KEK sesuai target 2019 (*on track*).

PN Kedaulatan Energi telah menunjukkan capaian yang baik. *Lifting* gas bumi mencapai 1.140 ribu *barrel oil equivalent per day*/BOEPD atau mencapai 99,1 persen dari target 2017, hal ini sejalan dengan beberapa lapangan gas bumi yang dikembangkan sudah berproduksi. Rasio elektrifikasi telah mencapai 95,35 persen atau meningkat 4,2 persen dari tahun 2016.

PN Pembangunan Pariwisata masih perlu ditingkatkan dalam hal peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masih mencapai 12,02 juta orang pada tahun 2017. Sementara, peningkatan jumlah kunjungan wisata nusantara (265 juta kunjungan) dan penerimaan devisa sebesar 200 triliun rupiah telah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2017.

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan mencakup 7 (tujuh) PN, yaitu: (1) Pengembangan Konektivitas Nasional, (2) Antarkelompok Pendapatan, (3) Reforma Agraria, (4) Daerah Perbatasan, (5) Pembangunan Daerah Tertinggal, (6) Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dan (7) Pembangunan Perkotaan.

PN Pengembangan Konektivitas Nasional telah menunjukkan upaya untuk membangun konektivitas antarwilayah dan integrasi antarkawasan strategis serta simpul transportasi guna mendukung pemerataan ekonomi, seperti penurunan *dwelling time* pelabuhan dari 4,39 hari (2015) menjadi 3,35 hari (2017), peningkatan kondisi mantap jalan dari 91 persen (2016) menjadi 92 persen (2017), serta penurunan rasio fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan dari kondisi *baseline* sebesar 32 persen.

PN Antarkelompok Pendapatan menunjukkan pencapaian baik. Kesenjangan antarkelompok pendapatan dapat diperkecil pada tahun 2017 ditunjukkan dengan menurunnya Rasio *Gini* dari semula di kisaran 0,4 (2012-2015) menjadi 0,393 (Maret 2017). Pencapaian tersebut antara lain didukung oleh peningkatan akses terhadap layanan keuangan bagi penduduk berpendapatan 40 persen terbawah sebesar 29,6 persen (2017) dan perluasan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 92,4 juta penduduk miskin dan rentan.

PN Reforma Agraria diarahkan untuk melakukan redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif, dan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), diupayakan pemenuhan target bidang dan kawasan yang diinventarisasi seluas 2,4 juta hektar dan jumlah sertipikat hak atas tanah 975 ribu hektar.

PN Daerah Perbatasan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara, dan peningkatan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi. Secara umum telah dilakukan pengembangan 5 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di perbatasan dan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

PN Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 13,47 persen dari 13,96 persen di tahun 2016. Hal ini didukung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.4 -

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas adalah penguatan struktur organisasi lembaga pemerintah dan satuan pendidikan yang handal dan efisien.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak adalah penguatan kapasitas pemangku kepentingan perumahan dan permukiman di pusat dan daerah terutama pada OPD bidang perumahan dan permukiman serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan seperti kelompok kerja/forum lainnya.

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar pada KP Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu adalah penguatan peran dinas sosial dan OPD terkait lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan basis data terpadu penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk KP Percepatan Pencapaian SPM di Daerah adalah pembentukan Sekretariat Bersama SPM (Sekber SPM) di daerah.

4.1.1 Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas

Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan diupayakan antara lain melalui penyempurnaan distribusi program-program pemerintah sehingga tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar distribusi pendapatan 40 persen penduduk terbawah terus membaik. Adapun sasaran dan indikator PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan terdapat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan

No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{**)}	2019 ^{**)}
1.	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah				
	Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)	91,1 ^{a)}	95,4 ^{a)}	96,0	97,0
2	Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB				
	Kontribusi UMK dan koperasi terhadap PDB(%)	57,9 ^{b)}	58,2 ^{***b)}	58,5 ^{***)}	58,8 ^{***)}

Sumber: a) Kemensos, 2018 , b) KemenKUKM, 2018

Keterangan: *) Realisasi **) Target ***) prognosa/estimasi sementara

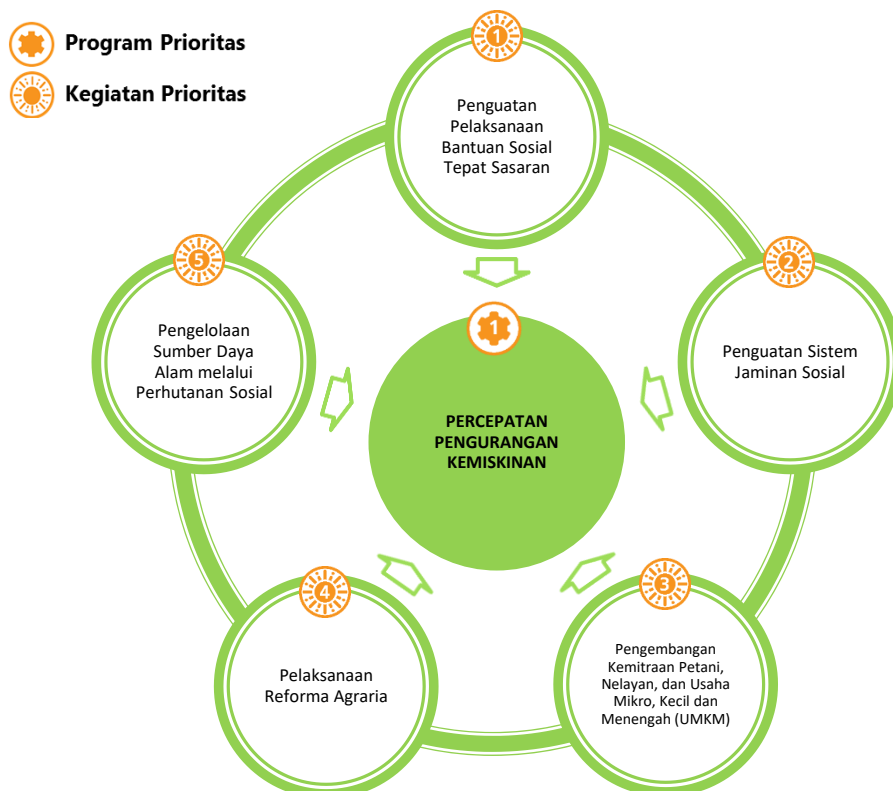
PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan diwujudkan melalui 5 (lima) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.2, yaitu: (1) Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tepat Sasaran; (2) Penguatan Sistem Jaminan Sosial; (3) Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); (4) Pelaksanaan Reforma Agraria; dan (5) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) melalui Perhutanan Sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.5 -

Gambar 4.2
Kerangka PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Sasaran masing-masing KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran dan Indikator KP
dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
1.	Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial		
		a. Tersalurkannya PKH bagi 10 juta KPM, dengan kenaikan indeks kondisionalitas bantuan	• 34 provinsi	• Kemensos
		b. Tersalurkannya Bantuan Pangan Nontunai bagi 15,6 juta KPM di seluruh Kabupaten/Kota	• 34 provinsi	
		c. Tersalurkannya bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada sebanyak 17.927.308 siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK	• 34 provinsi	• Kemendikbud • Kemenag



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.6 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
		d. Tersalurkannya bantuan pendidikan melalui KIP kepada sebanyak 2.203.285 siswa miskin MI/MTs/MA/Ula/Wustha/Ulya/SDTK/SMPTK/SMAK/SMTK	• 34 provinsi	
		e. Tersalurkannya subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan tidak mampu sesuai dengan data terpadu	• 34 provinsi	• KESDM
		f. Tersalurkannya subsidi elpiji 3 kg kepada 27,04 juta kepala keluarga	• 34 provinsi	
		g. Terlaksananya penarikan pekerja anak PKH dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) sebesar 8000 pekerja anak	• 10 provinsi	• Kemenaker
2.	Penguatan Sistem Jaminan Sosial	Meningkatnya persentase penduduk dan pekerja berpendapatan 40 persen terbawah yang tercakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		
		a. Tersalurkannya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 107,2 juta jiwa dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah	• 34 provinsi	• Kemenkes ^{*)} • Kemensos • Kemenko PMK • DJSN
		b. Tercapainya 10 persen pekerja dari 40 persen ekonomi terbawah yang tercakup Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	• Pusat	• KKP ^{*)} • Kemenaker • Kemenko PMK • DJSN
3.	Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Meningkatnya jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang bermitra		
		a. Petani, nelayan, dan UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya sebanyak 114.500 orang	• Pusat	• KemenKUKM ^{*)} • Kemendag • Kemenperin • KPPU • Kemenaker • Kemensos
		b. Petani, nelayan, dan UMKM yang terlibat dalam kemitraan sebanyak 2.632 orang		
		c. Kelompok/lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya untuk terlibat pada kemitraan sebanyak 500 kelompok/lembaga		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.7 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator dan Target	Lokasi	K/L Pelaksana
4.	Pelaksanaan Reforma Agraria	Mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani		
		a. Terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebesar 111.305 hektar	• 7 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK • KemenATR/BPN*) • Kementan • KemenKUKM • KKP • KemendesPDTT
		b. Terlaksananya redistribusi tanah sebesar 750 ribu bidang (600 ribu hektar)	• 34 Provinsi	
		c. Terlaksananya legalisasi aset tanah sebanyak 6,27 juta bidang (5,02 juta hektar)	• 34 Provinsi	
		d. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat bagi penerima TORA sebanyak 176 kelompok masyarakat	• 34 Provinsi	
5.	Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari		
		a. Terkelolanya hutan oleh masyarakat desa melalui hutan kemasyarakatan, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan seluas 1 juta ha	• 33 provinsi	• KLHK
		b. Meningkatnya jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 1500 kelompok	• 32 provinsi	

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Keterangan: *) Berperan sebagai Koordinator/Pelaksana Utama KP

Aspek Kewilayahan

PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial. Adapun contoh aspek kewilayahan dari KP Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran ini tercantum sebagaimana Gambar 4.3 berikut.